

---

**PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

***THE EFFECT OF PERFORMANCE-BASED BUDGETING ON THE PERFORMANCE  
ACCOUNTABILITY OF GOVERNMENT AGENCIES***

<sup>1</sup>✉ **Darnawati**

Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo  
[risdadarna@gmail.com](mailto:risdadarna@gmail.com)

<sup>2</sup>**Herman Haluti**

Universitas Ichsan Gorontalo  
[hermanhaluti@gmail.com](mailto:hermanhaluti@gmail.com)

<sup>3</sup>**Bala Bakri**

Universitas Ichsan Sidenreng Rappang  
[balabakri@gmail.com](mailto:balabakri@gmail.com)

<sup>4</sup>**Reyther Biki**

Universitas Ichsan Gorontalo  
[reytherbiki@gmail.com](mailto:reytherbiki@gmail.com)

**ABSTRAK**

*This study aims to find and analyze the effect of performance-based budgeting on the performance accountability of government agencies at the Secretariat of the Regional People's Representative Council of Gorontalo City. Quantitative method is applied in this study using a survey data collection by sampling a single population. It employs a questionnaire as a data collection tool. Data analysis uses path analysis to test the hypotheses. The results of the study indicate that the first hypothesis, the performance-based budgeting, consisting of the sub variables of performance measurement (X1), rewards and punishments (X2), performance contracts (X3), external and internal control (X4), and management accountability (X5), simultaneously has a positive and significant effect on performance accountability at the Secretariat of the Regional People's Representative Council of Gorontalo City, namely 0.935 (93.50%), with the remaining 0.065 (6.50%) influenced by other variables unexamined, such as budget participation. The second, third, fourth, fifth, and sixth hypotheses, namely the sub variables performance measurement (X1), rewards and punishments (X2), performance contracts (X3), external and internal control (X4), and management accountability (X5), also have a positive and significant effect on performance accountability, amounting to 4.20%, 7.40%, 3.50%, 2.70%, and 16.70%, respectively.*

*Keywords: Performance-Based Budgeting, Performance Accountability*

**ABSTRAK**

Tujuan Penelitian ini adalah bermaksud mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo. Jenis penelitian kuantitatif diterapkan dalam penelitian ini dengan metode pengumpulan data survei, yaitu dengan cara mengambil sampel dari satu populasi. Kuesioner digunakan sebagai alat pengumpulan data. Analisis data menggunakan analisis jalur untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada hipotesis pertama, penerapan anggaran berbasis kinerja yang terdiri dari subvariabel Pengukuran Kinerja (X1), penghargaan dan hukuman (X2), kontrak kinerja (X3), kontrol eksternal dan internal (X4), dan pertanggungjawaban manajemen (X5) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Gorontalo sebesar 0,935 (93,50%), dan sisanya 0,065 (6,50%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti partisipasi anggaran. Hipotesis kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam yaitu subvariabel pengukuran kinerja (X1), penghargaan dan hukuman (X2), kontrak kinerja (X3), kontrol eksternal dan internal (X4), dan



---

pertanggungjawaban manajemen (X5) juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja masing-masing sebesar 4,20%, 7,40%, 3,50%, 2,70% dan 16,70%.

Kata kunci: Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas Kinerja

## **PENDAHULUAN**

Semenjak bergulirnya era reformasi tahun 1998 pemerintah terus berupaya untuk melakukan perubahan terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipati dan akuntabel. Dalam ketetapan MPR Nomor :XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan juga ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 yang didalamnya memuat ketentuan normatif asas umum penyelenggaraan negara yaitu asas kepentingan, tertib penyelenggaraan negara, kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas.

Salah satu asas yang sangat memegang peranan penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menjamin bagi setiap penyelenggaraan negara dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Proses penyusunan anggaran merupakan bagian yang penting dilakukan pada sebuah organisasi baik organisasi swasta maupun sektor pemerintahan. Proses penyusunan anggaran pemerintahan berkaitan dengan bagaimana menentukan besarnya alokasi dana dari masing-masing program dan kegiatan dengan ukuran satuan moneter. Proses penyusunan anggaran ini menjadi sangat penting manakala suatu anggaran yang tidak efektif dan tidak berlandaskan kinerja akan menjadikan perencanaan yang telah di susun menjadi gagal.

Anggaran sektor pemerintahan merupakan (instrumen) akuntabilitas atas pengolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik, Hasil dari pengelolaan sumber daya daerah oleh masing-masing pemerintah daerah akan dilaporkan dalam bentuk laporan akuntabilitas atau laporan pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik (Effendi, 2006).

Suatu anggaran yang berbasis kinerja sangat berkaitan erat dengan visi dan misi dari suatu organisasi pemerintahan dan rencana strategis yang ditetapkan serta akan berorientasi pada hasil (output) dan outcome yang disepakati. Penyusunan anggaran berbasis kinerja akan berlandaskan pada sasaran dan tujuan yang diinginkan oleh publik yang mencakup akuntabilitas atau pertanggungjawaban tentang capaian value for money, adalah ekonomi yang efisien (hemat cermat) untuk pengadaan dan pengalokasian sumber daya yang berdaya guna dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya di maksimalkan (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif atau berhasil guna untuk mencapai tujuan dan sasaran. (Bastian, 2006).

Penerapan anggaran berbasis kinerja di Indonesia dicanangkan melalui pemberlakuan UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan ditetapkan secara bertahap mulai anggaran 2005. Namun demikian, hingga saat ini masih sulit untuk melihat tolak ukur memadai yang dapat dimanfaatkan untuk mengukur

kinerja pemerintah daerah secara komparatif. padahal tolak ukur ini sangat diperlukan untuk menjadi pedoman, baik bagi pemerintah sendiri maupun pihak lain yang berkepentingan. Penerapan anggaran berbasis kinerja memiliki berbagai kendala dalam pelaksanaannya, hal ini disebabkan karena adanya perubahan sistem penganggaran. Perubahan ini akan menyebabkan berubahnya mind set tidak hanya pada lingkungan pelaksana atau pemerintah (eksekutif), namun juga perubahan pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga pengawas atau legislatif. Pola pikir (Mind set) lembaga legislatif dalam melakukan pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebaiknya juga harus berubah menjadi konsep output base, tidak lagi input base.

Penerapan anggaran berbasis kinerja memiliki nilai yang cukup berarti bagi akuntabilitas publik Hal ini dikarenakan setiap instansi pemerintah harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan, sehingga setiap komponen dalam instansi pemerintah bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang ditetapkan. Dalam memahami penganggaran berbasis kinerja, komitmen dari seluruh komponen organisasi untuk menyiapkan sumber daya berupa anggaran, kegiatan, dan sumber daya manusia sangat penting.

Dalam menerapkan anggaran berbasis kinerja terdapat unsur-unsur penting pendukung seperti; aspek pengukuran kinerja, aspek penghargaan dan hukuman, aspek kontrak kinerja, aspek kontrol eksternal dan internal. Kontrol diarahkan pada kontrol input suatu kegiatan, serta apa dan bagaimana pencapaian output dan pertanggungjawaban manajemen, yaitu manajer bertanggung jawab terhadap output baik volume, waktu pengerjaan maupun kualitasnya. Kedua, dengan adanya kebebasan bagi manajer, maka manajer dapat melakukan dan mengekspresikan profesionalitas mereka dengan optimal (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, BPPK. 2008)

Unsur unsur pendukung tercapainya penerapan anggaran berbasis kinerja yang dikeluarkan oleh BPPK merupakan Unsur penting di mana apabila anggaran berbasis kinerja ini tercapai, maka akaun terpenuhi juga akuntabilitas kinerja pemerintah. Pemerintah menganggap bahwa dengan adanya akuntabilitas maka mampu memberikan perubahan kinerja di instansi pemerintahan yang lebih baik, atau sering dikenal dengan istilah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). AKIP merupakan wujud dari pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dilakukan secara periodik. Agar lebih efektifnya penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka sangat diperlukan adanya komitmen yang kuat dari berbagai lini organisasi yang memiliki wewenang serta bertanggung jawab pada bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan pertanggungjawaban antara capaian kinerja dengan program dan kebijakan, kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dapat dipahami oleh semua pegawai dan pimpinan. Selain itu juga maka visi dan misi disesuaikan dengan program dan perlu ditetapkan berdasarkan rencana strategis dari organisasi. Indikator-indikator dari kinerja perlu ditetapkan untuk tiap program kegiatan. perlu

adanya alat untuk menganalisis keuangan di tiap-tiap kegiatan, dan membuat laporan kepada atasan untuk setiap kegiatan.

Pentingnya dilakukan penelitian tentang AKIP yaitu melihat dari fenomena yang terjadi di lingkungan Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo, di mana kinerja AKIP pemerintah saat ini masih banyak hal-hal yang masih harus diperbaiki yaitu adanya kejelasan sasaran anggaran dari program yang belum sepenuhnya dimengerti oleh para pegawai. Selain itu para pegawai belum sepenuhnya memahami perlunya pencapaian program yang dijalankan dengan visi dan misi organisasi, dan belum sepenuhnya menggunakan LAKIP sebagai bahan acuan dalam perencanaan program selanjutnya.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan paradigma penelitian asosiatif kausal, yang bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Objek penelitian adalah penerapan anggaran berbasis kinerja yang meliputi pengukuran kinerja, penghargaan dan hukuman, kontrak kinerja, kontrol eksternal dan internal, serta pertanggungjawaban manajemen terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian dilaksanakan pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Gorontalo dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama pengumpulan data.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Sekretariat DPRD Kota Gorontalo, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh, sehingga seluruh anggota populasi dijadikan responden penelitian. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner dan data sekunder yang bersumber dari dokumen, laporan, serta literatur pendukung yang relevan. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala ordinal untuk mengukur persepsi responden terhadap indikator masing-masing variabel penelitian.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan kualitas instrumen penelitian, konversi data dari skala ordinal ke skala interval, serta analisis statistik inferensial. Metode analisis utama yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis) untuk menguji pengaruh langsung dan simultan variabel anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji simultan dan uji parsial guna memperoleh kesimpulan empiris yang mendukung tujuan penelitian.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Analisis Data Statistik**

Analisis statistik bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo. Berdasarkan hasil analisis data statistik maka dapat dibuat struktur persamaan analisis jalur sebagai berikut :

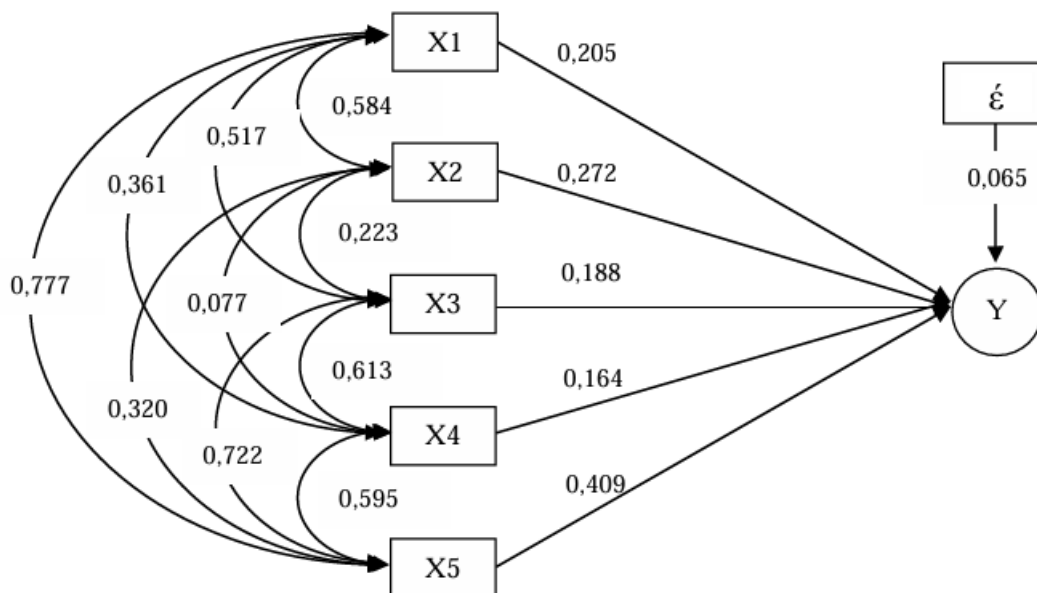
$$Y = 0,205X_1 + 0,272X_2 + 0,188X_3 + 0,164X_4 + 0,409X_5 + 0,065$$

Berdasarkan structural persamaan jalur tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1. Variabel Pengukuran Kinerja (X1) memiliki pengaruh dengan arah koefisien positif terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) sebesar  $(0,205)^2$  atau 0,042 (4,2%). Nilai tersebut bermakna jika Pengukuran Kinerja (X1) lebih ditingkatkan dan di efektifkan, maka variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) akan meningkat sebesar  $(0,205)^2$  atau sebesar 0,042 (4,2%).
2. Variabel Penghargaan dan Hukuman (X2) memiliki pengaruh dengan arah koefisien positif terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja (Y) sebesar  $(0,272)^2$  atau 0,074 (7,4%). Nilai tersebut bermakna jika Pengukuran Kinerja (X1) lebih ditingkatkan dan di efektifkan, maka variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) akan meningkat sebesar  $(0,272)^2$  atau sebesar 0,074 (7,4%).
3. Variabel Kontak Kinerja (X3) memiliki pengaruh dengan arah koefisien positif terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja (Y) sebesar  $(0,188)^2$  atau 0,035 (3,5%). Nilai tersebut bermakna jika Pengukuran Kinerja (X1) lebih ditingkatkan dan di efektifkan, maka variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) akan meningkat sebesar  $(0,188)^2$  atau sebesar 0,035 (3,5%)
4. Variabel Kontrol Ekternal dan Internal (X4) memiliki pengaruh dengan arah koefisien positif terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) sebesar  $(0,164)^2$  atau 0,027 (2,7%). Nilai tersebut bermakna jika Pengukuran Kinerja (X1) lebih ditingkatkan dan di efektifkan, maka variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) akan meningkat sebesar  $(0,164)^2$  atau sebesar 0,027 (2,7%)
5. Variabel Pertanggung jawaban Manajemen (X5) memiliki pengaruh dengan arah koefisien positif terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) sebesar  $(0,409)^2$  atau 0,167 (16,70%). Nilai tersebut bermakna jika Pengukuran Kinerja (X1) lebih ditingkatkan dan di efektifkan, maka variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) akan meningkat sebesar  $(0,409)^2$  atau sebesar 0,167 (16,70%)
6. Nilai R<sup>2</sup> sebesar sebesar 0,935 atau 93,50% menunjukkan besarnya pengaruh variasi variabel independen Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap variabel dependen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara simultan sedangkan sisanya sebesar 0,065 atau 6,50% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.
7. Koefisien korelasi sub variabel X1 dan X2 signifikan dengan arah positif sebesar 58,40%, Koefisien korelasi sub variabel X1 dan X3 signifikan dengan arah positif sebesar 51,70%, Koefisien korelasi sub variabel X1 dan X4 signifikan dengan arah positif sebesar 36,10%. Koefisien korelasi sub variabel X1 dan X5 signifikan dengan arah positif sebesar 77,70%. Koefisien korelasi sub variabel X2 dan X3 signifikan dengan arah positif sebesar 22,30%. Koefisien korelasi sub variabel X2 dan X4 signifikan dengan arah positif sebesar 7,70%. Koefisien korelasi sub variabel X2 dan X5 signifikan dengan arah positif sebesar 32%. Koefisien korelasi sub variabel X3 dan X4 signifikan dengan arah positif sebesar 61,30%. Koefisien korelasi sub variabel X3 dan X5 signifikan dengan arah positif sebesar 72,20%. Koefisien korelasi sub variabel X4 dan X5 signifikan dengan arah positif sebesar 59,50%.

Berdasarkan hasil analisis data statistik maka dapat dibuat struktur analisis jalur sebagai berikut :



**Gambar 1 Analisis Jalur**

Berdasarkan gambar tersebut dapat juga dijelaskan bahwa besarnya pengaruh sub variabel Pengukuran Kinerja (X1), Hukuman (X2), Kontrak Kinerja (X3), Kontrol Eksternal dan Internal (X4), dan sub variabel Pertanggungjawaban (X5) baik pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan total pengaruhnya :

**Tabel 1 Koefisien Jalur, Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung, Total Pengaruh dan Kontribusi Simultan**

Keterangan	Koefisien Beta	Pengaruh langsung	Pengaruh Tidak Langsung					T Peng Tdk Langs	Ttl Pengaruh
			X1	X2	X3	X4	X5		
X1 → Y	0,205	0,042	-	0,033	0,020	0,012	0,065	0,130	0,171
X2 → Y	0,272	0,074	0,033	-	0,011	0,003	0,036	0,083	0,157
X3 → Y	0,188	0,035	0,020	0,011	-	0,019	0,056	0,106	0,141
X4 → Y	0,164	0,027	0,012	0,003	0,019	-	0,040	0,075	0,102
X5 → Y	0,409	0,167	0,065	0,036	0,056	0,040	-	0,196	0,364
X1,X2,X3,X4,X5 → Y									0,935
Pengaruh Variabel lain Terhadap Y									0,065
Total Pengaruh									1,00

Sumber : Data Olahan SPSS dan Ms Excel

**Pengujian Hipotesis**

**Uji F**

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan) memengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian simultan ini menggunakan uji F, yaitu dengan membandingkan antara nilai signifikan F dengan nilai signifikan yang digunakan yaitu pada level  $\alpha = 0,05$  (5%)

Berdasarkan lampiran tabel anova nilai sig sebesar 0.000 yang berarti secara simultan seluruh variabel independen : Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Yang Terdiri Dari Pengukuran Kinerja (X1), Penghargaan Dan Hukuman (X2), Kontrak Kinerja (X3), Kontrol Eksternal dan Internal (X4), dan Pertanggungjawaban Manajemen (X5) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian, model yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Gorontalo.

#### **Uji Perkiraan Ketetapan Model (*Goodness Of Fit Test*)**

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji Goodness Of Fit dari model analisis jalur, yaitu seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan lampiran tabel model summary menunjukkan nilai R square sebesar 0,935 atau 93,50%. Hasil ini menunjukkan bahwa besarnya kontribusi variabel bebas secara bersama-sama (simultan) yang terdiri dari sub variabel Pengukuran Kinerja (X1), Penghargaan dan Hukuman (X2), Kontrak Kinerja (X3), Kontrol Eksternal dan Internal (X4), dan Pertanggungjawaban Manajemen (X5) yang dapat disumbangkan untuk perubahan variasi variabel terikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0,935 atau 93,50% ini adalah termasuk dalam kategori sangat kuat dan sisanya sebesar 0,065 atau 6,50 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model. Besarnya R square berkisar antara 0 s/d 100. Semakin kecil besarnya R square, maka hubungan kedua variabel semakin lemah, sebaliknya jika nilai R square semakin mendekati 100, maka hubungan variabel semakin kuat (Riduwan, 2014) Uji Parsial (Uji T)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial memengaruhi variabel dependen secara signifikan. Untuk pengujian secara parsial digunakan uji-t. Hasil perhitungan statistik pada pengujian parsial berdasarkan pada lampiran tabel coefisient dapat dijelaskan berikut ini.

Pengukuran Kinerja (X1) menunjukkan nilai sig sebesar 0,044 atau (4,40 %) yang berarti < dari nilai  $\alpha$  0,05 (5%), hal ini menunjukkan bahwa variabel Pengukuran Kinerja (X1) berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga penelitian ini menerima hipotesis pertama. Variabel Penghargaan dan Hukuman (X2) menunjukkan nilai sig 0,000 (0,0%) yang berarti < dari nilai  $\alpha$  5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Penghargaan Dan Hukuman (X2) berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga penelitian ini menerima hipotesis kedua. Variabel Kontrak Kinerja (X3) menunjukkan nilai sig 0,021 (2,10%) yang berarti lebih > dari nilai  $\alpha$  5% hal ini menunjukkan bahwa variabel Kontrak Kinerja (X3) berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga penelitian ini menerima hipotesis ketiga. Variabel Kontrol Eksternal dan Internal (X4) menunjukkan nilai sig 0,021 (2,10%) yang berarti < dari nilai  $\alpha$  5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Penghargaan dan hukuman berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah sehingga penelitian ini menerima hipotesis ke empat. Variabel Pertanggungjawaban Manajemen (X5) menunjukkan nilai sig 0,001 (0,10%) yang berarti < dari nilai  $\alpha$  5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pertanggungjawaban Manajemen berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga penelitian ini menerima hipotesis ke lima.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis baik secara simultan ataupun secara parsial dapat disimpulkan sebagai berikut:

**Tabel 2 Hasil Pengujian Hipotesis Dan Besarnya Pengaruh Variabel X Terhadap Y**

Pengaruh antar Variabel	Total pengaruh	Sig	Alpha	Keputusan	Hipotesis
X1,X2,X3,X4,X5 terhadap Y	0,935	0,000	0.05	Signifikan*	Diterima
X1 terhadap Y	0,205	0,044	0.05	Signifikan*	Diterima
X2 terhadap Y	0,272	0,000	0.05	Signifikan*	Diterima
X3 terhadap Y	0,188	0,021	0.05	Signifikan*	Diterima
X4 terhadap Y	0,164	0,021	0.05	Signifikan*	Diterima
X5 terhadap Y	0,409	0,001	0.05	Signifikan*	Diterima

Keterangan : \* Signifikan apabila nilai sig < nilai Alpha

Berikut komentar akademik untuk setiap poin pada tabel pengujian hipotesis tersebut:

#### **1. Pengaruh X1, X2, X3, X4, dan X5 terhadap Y (Simultan)**

Nilai total pengaruh sebesar 0,935 dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$  menunjukkan bahwa seluruh variabel anggaran berbasis kinerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja secara komprehensif memiliki kontribusi yang sangat kuat dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, sehingga hipotesis simultan dapat diterima.

#### **2. Pengaruh X1 (Pengukuran Kinerja) terhadap Y**

Nilai pengaruh sebesar 0,205 dengan signifikansi  $0,044 < 0,05$  menunjukkan bahwa pengukuran kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Temuan ini mengindikasikan bahwa kejelasan indikator, target, serta evaluasi kinerja yang terukur mampu meningkatkan pertanggungjawaban kinerja organisasi, sehingga hipotesis diterima.

#### **3. Pengaruh X2 (Penghargaan dan Hukuman) terhadap Y**

Variabel penghargaan dan hukuman memiliki nilai pengaruh 0,272 dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$ , yang berarti berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem insentif dan sanksi yang jelas dapat mendorong peningkatan kinerja aparatur dan memperkuat akuntabilitas instansi pemerintah.

#### **4. Pengaruh X3 (Kontrak Kinerja) terhadap Y**

Nilai pengaruh sebesar 0,188 dengan signifikansi  $0,021 < 0,05$  mengindikasikan bahwa kontrak kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa adanya kesepakatan kinerja yang jelas antara pimpinan dan pelaksana kegiatan dapat meningkatkan kejelasan tanggung jawab dan hasil kerja yang dipertanggungjawabkan.

#### **5. Pengaruh X4 (Kontrol Eksternal dan Internal) terhadap Y**

Variabel kontrol eksternal dan internal memiliki pengaruh sebesar 0,164 dengan nilai signifikansi  $0,021 < 0,05$ , yang berarti berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini menegaskan bahwa mekanisme pengawasan yang efektif, baik dari dalam maupun luar organisasi, berperan penting dalam memastikan penggunaan anggaran dan pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

#### **6. Pengaruh X5 (Pertanggungjawaban Manajemen) terhadap Y**

Nilai pengaruh tertinggi secara parsial ditunjukkan oleh variabel pertanggungjawaban manajemen sebesar 0,409 dengan signifikansi  $0,001 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban manajemen berpengaruh positif dan signifikan serta memiliki kontribusi paling dominan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, semakin baik tanggung jawab manajerial dalam pengelolaan anggaran dan kinerja, maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang dihasilkan.

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil analisis statistik dan pengujian hipotesis dengan menggunakan program SPSS dan Microsoft Excel, maka dapat diketahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan uji kemaknaan signifikan. Hasil pengujian hipotesis dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dijelaskan berikut ini.

#### **1. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Secara Simultan Berpengaruh Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi variabel Penerapan**

Anggaran Berbasis Kinerja meliputi Pengukuran Kinerja (X1), Penghargaan dan Hukuman (X2), Kontrak Kinerja (X3), Kontrol Eksternal dan Internal (X4), Pertanggungjawaban Manajemen (X5) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Gorontalo sebesar 93,50% hasil ini termasuk dalam kategori sangat kuat. Sisanya sebesar 6,50% dipengaruhi oleh variabel luar yang tidak dijelaskan dalam model (variabel luar yang turut mempengaruhi variabel Y) seperti rencana anggaran, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja yang menjadi indikator lain dari penerapan anggaran berbasis kinerja. Besarnya pengaruh ini menunjukkan bahwa, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja merupakan struktur yang menyatu dalam suatu entitas, yang menggunakan sumber daya fisik dan komponen lain. Hasil ini termasuk dalam kategori sangat kuat dan menunjukkan bahwa Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Gorontalo pada dasarnya sudah dilaksanakan secara maksimal dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perlunya peningkatan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Sekretariat DPRD Kota Gorontalo agar dapat menciptakan Efisiensi, Efektivitas dalam pemanfaatan anggaran belanja publik dengan output dan outcome yang jelas sesuai dengan prioritas nasional sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat luas. Proses penganggaran yang telah ditetapkan adalah pedoman dalam melaksanakan kegiatan pemerintah sehingga tercapainya tujuan anggaran sama halnya dengan tercapai

pula sasaran pemerintah daerah tersebut. Oleh karena itu anggaran harus berkualitas, realistis dengan adanya pengendalian yang efektif maka akan dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD Kota Gorontalo.

## **2. Sub Variabel Pengukuran Kinerja (X1) Berpengaruh Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)**

Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa sub variabel Pengukuran Kinerja (X1) berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis Kedua yang menyatakan "Pengukuran kinerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Gorontalo" diterima. Koefisien variabel Pengukuran Kinerja menunjukan arah positif terhadap Akuntabilitas Kinerja sebesar 0,205 atau jika di persenkan memiliki pengaruh langsung sebesar 4,2% ( $0,205 = 0,042$ ).

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perlu dilakukan pengukuran kinerja yang baik karena pengukuran kinerja merupakan suatu proses yang objektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mencapai Akuntabilitas yang baik maka harus menentukan program dan kegiatan dengan jelas, karena dengan menentukan program dan kegiatan dengan jelas maka akan tergambar pula dengan jelas pembiayaan dari masing-masing program kegiatan agar biaya yang dikeluarkan tidak bias kemana-mana atau tidak di salah gunakan. Selain itu diperlukan sistem informasi yang memadai untuk menilai pencapaian kinerja dari masing-masing program kegiatan agar program tersebut terkontrol penyelesaiannya, agar tercapai penilai yang fair diperlukan peran dari pihak eksternal dalam mengukur kinerja agar lebih independen.

Penerapan anggaran berbasis kinerja berupa pengukuran kinerja pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Gorontalo pada dasarnya telah dilaksanakan dengan baik hal ini terlihat pada tanggapan responden dengan kategori tinggi atau rata-rata responden menjawab setuju terhadap pernyataan yang disampaikan. Mereka menyatakan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja pada sekretariat DPRD Kota Gorontalo telah menyajikan gambaran yang jelas mengenai pembiayaan dari masing-masing program kegiatan dan keluarannya, mereka juga telah menggunakan sistem informasi yang memadai untuk menilai pencapaian kinerja tiap unit, menggunakan peran dari pihak eksternal dalam mengukur kinerja agar lebih independen, mengukur kinerja yang strategis bukan menekankan tingkat komprehensif dan birokratis.

Pimpinan instansi pemerintah daerah menyadari sepenuhnya mengukur kinerja adalah alat terpenting dan berdaya guna untuk meningkatkan kinerja lembaga secara keseluruhan. Adanya tolak ukur terhadap kinerja maka diharapkan terjadinya peningkatan keinginan dan kebutuhan serta memperbaiki kinerja lembaga dan bukan sekedar pengukuran secara formal dan pelaporan kinerja semata. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik sehingga upaya perbaikan terus menerus akan mencapai keberhasilan dimasa mendatang (mardiasmo, 2005)

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haspiarti (2012) dengan judul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Sekretariat Kota Jakarta Selatan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana hasil penelitian ini juga berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Gorontalo.

### **3. Sub Variabel Penghargaan Dan Hukuman (X2) Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).**

Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa sub variable Penghargaan Dan Hukuman (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis ketiga yang menyatakan "Penghargaan dan Hukuman berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Gorontalo" dapat diterima.

Koefisien variabel Penghargaan dan Hukuman secara layak menunjukkan arah yang positif terhadap Akuntabilitas Kinerja sebesar 0,272 atau jika di persenkan memiliki pengaruh langsung sebesar 7,4% ( $0,272 = 0,074$ ). Hal ini mengandung pengertian bahwa apabila pemberian penghargaan dan penegakan hukuman pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Gorontalo semakin ditingkatkan maka pada dasarnya akan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan dimana Sekretariat DPRD Kota Gorontalo sangat memperhatikan aspek penghargaan dan hukuman dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kantor tersebut. Untuk lebih jelasnya dijelaskan berdasarkan indikator masing-masing

Berdasarkan hasil pengujian analisis deskriptif tanggapan dari responden menunjukkan secara rata-rata memberikan tanggapan untuk Penghargaan dan Hukuman secara layak yang dilakukan oleh Kantor Sekretariat DPRD Kota Gorontalo termasuk dalam kategori tinggi kecuali item pernyataan no 2 dan item pernyataan no 3 secara rata-rata memberikan jawaban sedang. Hasil ini terlihat dari tanggapan responden tentang pemberian insentif atas kinerja yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan anggaran berbasis kinerja telah dilakukan sebagaimana mestinya. Responden memberikan tanggapan tinggi atau mereka setuju bahwa pemberian insentif berjalan dengan baik.

Selain itu aspek lain juga yang telah dilaksanakan dengan baik adalah pemberian hukuman atas kelainan tugas, dimana responden menjawab dengan kategori tinggi artinya telah berjalan dengan baik. Pelaksanaan penganggaran juga telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan tingkat efisiensi yang berkaitan dengan program untuk kegiatan yang bersifat pelayanan publik. Tanggapan responden untuk indikator ini juga dengan kategori tinggi artinya telah dilaksanakan dengan baik.

Penghargaan dan Hukuman bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana para pegawai dalam bekerja, selain itu juga akan memberikan efek baik bagi pegawai untuk lebih meningkatkan kualitas pekerjaan mereka. Namun jika mereka mengalami kegagalan dalam mencapai kinerja maka akan diberi hukuman dalam bentuk seperti peringatan untuk memotivasi pegawai agar tidak terulang kembali kesalahan yang seperti itu lagi.

Menurut Mahmudi (2005), penghargaan adalah reward dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan. Hukuman adalah tindakan yang diberikan oleh pendidik terhadap anak didik yang telah melakukan kesalahan, dengan tujuan agar anak didik tidak akan mengulanginya lagi dan akan memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. sama halnya juga dengan pegawai jika pegawai tersebut memiliki prestasi dalam bekerja atau memiliki kualitas kerja yang baik maka akan diberikan insentif namun jika sebaliknya akan diberikan hukuman agar pegawai tersebut bertanggungjawab atas apa yang dikerjakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haspiarti (2012) dengan judul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Secretariat Kota Jakarta Selatan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **4. Sub Variabel Kontrak Atas Kinerja (X3) berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)**

Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa sub variabel Kontrak Atas Kinerja (X3) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis keempat yang menyatakan "Kontrak Atas Kinerja Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Gorontalo "diterima.

Koefisien variabel Kontrak Atas Kinerja menunjukkan arah yang positif terhadap Akuntabilitas Kinerja sebesar sebesar 0,188 atau jika di persenkan memiliki 2 pengaruh langsung sebesar 3,5% ( $0,188 = 0,035$ ). Hal ini mengandung pengertian bahwa apabila Kontrak Atas Kinerja semakin ditingkatkan maka pada dasarnya akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja sebesar 3,50%.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja didukung oleh kontrak kinerja secara individu memiliki kategori Tinggi artinya sudah baik, demikian pula. Indikator tentang pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja didukung oleh kontrak kinerja dengan instansi terkait lainnya juga dengan kategori Tinggi. Indikator tentang pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja memiliki indikator yang jelas terhadap kontrak pengukuran kinerja secara individu dengan kategori Tinggi. Serta indikator tentang adanya definisi yang jelas terhadap pelayanan yang dikontrakkan dalam penganggaran dengan instransi terkait lainnya dengan kategori Tinggi.

Menurut Departemen Pekerjaan Umum (2006) dalam Febrianti (2016) kontrak atas kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang member amanah/tanggungjawab. Tujuan untuk diterapkannya kontrak kinerja adalah intensifikasi focus pada capaian tujuan dan sasaran, pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan public serta percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparansi dan akuntabel.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haspiarti (2012) dengan judul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Secretariat Kota Jakarta Selatan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

---

Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

**5. Sub Variabel Kontrol Eksternal dan Internal (X4) Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)**

Pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa sub variabel Kontrol Eksternal dan internal (X4) Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis keempat yang menyatakan “Kontrol Eksternal dan Internal Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Gorontalo” dapat diterima.

Koefisien sub variabel Kontrol Eksternal dan Internal menunjukkan arah positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar sebesar 0,164 atau jika di persenkan memiliki pengaruh langsung sebesar 2,7% ( $0,164 = 0,027$ ). Hasil ini mengandung pengertian bahwa Kontrol eksternal dan Internal semakin ditingkatkan maka pada dasarnya akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil penelitian ini sesuai dengan fakta dilapangan dimana kontrol eksternal dan internal mendapat perhatian dari pihak Sekretariat DPRD. Intansi tersebut telah melakukan pemisahan lembaga kontral dan lembaga pengguna anggaran, melakukan kontrol pada input, output dan outcome dan kontrol mereka lakukan sebelum dan sesudah anggaran digunakan sehingga hal tersebut berdampak terhadap meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi tersebut.

Berdasarkan hasil pengujian analisis deskriptif tanggapan responden menunjukkan kriteria yang tinggi. Kontrol Eksternal dan Internal sangat penting dilakukan di kantor tersebut karena berdasarkan kenyataan dilapangan adanya pemisahan antara lembaga control dengan lembaga pengguna anggaran sebaiknya kontrol dilakukan pada input dan output dan dilakukan sebelum dan sesudah anggaran digunakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haspiarti (2012) dengan judul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Secretariat Kota Jakarta Selatan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

**6. Sub Variabel Pertanggungjawaban Manajemen (X5) Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa sub variabel Pertanggungjawaban Manajemen (X5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis keenam yang menyatakan “Pertanggungjawaban Manajemen (X5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Gorontalo “dapat diterima.

Koefisien sub variabel Pertanggungjawaban Manajemen menunjukkan arah yang positif terhadap Akuntabilitas Kinerja sebesar sebesar 0,409 atau jika di persenkan memiliki pengaruh langsung sebesar 16,70% ( $0,409 = 0,167$ ). Hal ini mengandung pengertian bahwa apabila Pertanggungjawaban Manajemen semakin ditingkatkan maka pada dasarnya akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 16,70%. Hasil ini sesuai dengan fakta dilapangan di mana instansi telah melakukan pertanggungjawaban manajemen dengan baik

seperti pertanggungjawaban kewenangan dalam merencanakan dan mengelola anggaran, pengguna anggaran bertanggungjawab terhadap output, waktu dan kualitasnya. Pelaksanaan pertanggungjawaban yang telah dilakukan tersebut pada akhirnya berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada instansi tersebut.

Berdasarkan hasil pengujian analisis deskriptif tanggapan dari responden menunjukkan nilai pertanggungjawaban manajemen yang dilakukan termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini dikarenakan berdasarkan kenyataan dilapangan bahwa pertanggungjawaban oleh pimpinan meliputi penggunaan anggaran perencanakan, dan pengelolaan anggaran telah dijalankan dengan baik. Selain itu pengguna anggaran bertanggungjawab terhadap output baik volume, waktu pengerjaan maupun kualitasnya. Pengguna anggaran pada Kantor tersebut memberikan kebebasan untuk melakukan dan mengekspresikan profesionalitas dengan optimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haspiarti (2012) dengan judul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Secretariat Kota Jakarta Selatan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja yang meliputi pengukuran kinerja, penghargaan dan hukuman, kontrak kinerja, kontrol eksternal dan internal, serta pertanggungjawaban manajemen secara simultan maupun parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat DPRD Kota Gorontalo, dengan pertanggungjawaban manajemen sebagai variabel yang memiliki pengaruh paling dominan. Oleh karena itu, disarankan agar instansi terkait terus meningkatkan penerapan anggaran berbasis kinerja secara konsisten dan terintegrasi, khususnya dalam memperkuat peran manajerial, sistem pengukuran kinerja, mekanisme penghargaan dan hukuman, serta pengawasan internal dan eksternal guna mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan, efektif, dan akuntabel, sementara bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang relevan serta menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim, 2007. Manajemen Kinerja Sector Publik, Yokjakarta
- Agung Sugih Arti, 2014 Pengaruh Penerapan Anggran Beebasis Kinerja Terhadap Akuntanbilitas Kinerja Terhadap Akuntanbilitas Dinas Pendidikan Kota Depok
- Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan. 2008. Pengukuran Kinerja, Suatu Tinjauan Pada Instansi Pemerintah, Jakarta
- Bambang Sancoko, DKK 2008, kajian terhadap penerapan penganggaran berbasis kinerja di Indonesia, BPPK, Jakarta
- Sukma, Sadar, 2006, Anggaran Berbasis Kinerja, Jakarta



- Darise. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. PT.Indeks.Jakarta
- Endrayani, Sri, 2014, Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. e-Jurnal S1 Ak Universitas pendidikan Ganesa jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No 1 tahun 2014)
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis dengan program SPSS*. BP- Universitas Diponegoro , Semarang
- Hamid, Msf, 2015, Pengertian Kinerja, (Online) (<http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6788/Bab%202.pdf>)
- Haspiarti, 2012, pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. e-Jurnal S1 Ak Universitas 87 Hasanuddin Makasar, Akuntansi Program S1 (Volume 2 No 1 tahun 2012)
- Husen, Umar. 2009. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, Edisi Kedua, Jakarta: Rajawali Pers
- Kuncoro Engkos Achmad. 2007, *cara Menggunakan analisis jalur*, cetakan pertama penerbit Alfabeta Bandung
- Komang Sri Endayani, Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali)
- Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Mangkunegara, 2009, *Audit kinerja sector public*, Jakarta
- Pangumbalerang, S. Pinatik, 2014, Kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dinas pendapatan daerah dan badan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. *Jurnal EMBA Vol.2 No.2 Juni 2014*, Hal. 800-808
- Peraturan Menteri Daam Negeri No 13 than 2006 tentang Anggaran Berbasis Kinerja 88
- Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Riduwan, 2005, skala pengukuran variabel-variabel penelitian, penerbit Alfabeta Bandung
- Sugiono 2015, *Statistika Untuk penelitian*, Cetakan Ke-6 CV Alfabeta Bandung
- UU No.1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara
- UU No.33 tahun 2004 Tentang Keuangan Daerah
- UU No.23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Daerah